



TINGGINYA KETIMPANGAN DAN MINIMNYA PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA



Oktober 2025

infid.org



Analisis Ringkas INFID #1

TINGGINYA KETIMPANGAN
DAN MINIMNYA PERLINDUNGAN
TERHADAP PEKERJA

Penulis Utama:

Abdul Waidl, Program Manager INFID

Kontributor:

Siti Khoirun Ni'mah, Executive Director INFID

Bona Tua, Deputy Director INFID

Andi Nur Faizah, Research & Public Education Lead INFID

infid.org

Tulisan ini adalah bagian dari upaya advokasi **#CloseTheGap** untuk mengurangi ketimpangan di Indonesia. Advokasi ini dituangkan melalui narasi-narasi kritis berbasis bukti mengenai isu ketimpangan di Indonesia. Harapannya, kajian singkat ini bisa berguna sebagai bahan kampanye, pemahaman bersama, atau poin-poin diskusi di antara staf INFID, anggota, dan jaringan. Gagasan dalam tulisan ini merupakan hasil diskusi **Pokja 4 Demokrasi, Politik dan Reformasi Tata Kelola**.

Tulisan ini **boleh dikutip** dalam riset atau dokumen lainnya.

PENDAHULUAN

Paradoks Pertumbuhan Ekonomi

Narasi keberhasilan ekonomi Indonesia pasca-pandemi sering kali didominasi oleh angka-angka pertumbuhan yang impresif. Namun, di balik statistik makro yang menggembirakan, tersembunyi sebuah realitas yang jauh lebih kompleks dan mengkhawatirkan: semakin dalamnya jurang ketimpangan dan terus melemahnya jaring pengaman bagi para pekerja yang menjadi tulang punggung perekonomian itu sendiri. Tulisan berikut ini bertujuan untuk membongkar paradoks tersebut dengan menganalisis secara kritis siapa yang sesungguhnya menikmati buah dari pertumbuhan ekonomi, bagaimana ketimpangan termanifestasi dalam struktur upah dan kekayaan, serta bagaimana ekspansi sektor informal justru menjadi arena baru bagi kerentanan pekerja. Pada akhirnya, analisis ini menegaskan bahwa tanpa komitmen politik yang serius untuk menciptakan keadilan, pertumbuhan ekonomi hanya akan melanggengkan siklus eksploitasi dan ketidakpercayaan publik.

Di Balik Angka Pertumbuhan: Euforia Statistik dan Realitas Lapangan

Perekonomian Indonesia menunjukkan resiliensi yang luar biasa. Badan Pusat Statistik (BPS) secara konsisten melaporkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di atas 5% secara tahunan (*year-on-year*).



Sektor-sektor seperti Transportasi dan Pergudangan serta Informasi dan Komunikasi—keduanya merupakan proksi dari ekonomi digital—menjadi mesin pertumbuhan yang signifikan. Namun, euforia statistik ini mengaburkan dua fakta krusial. Pertama, pertumbuhan di sektor-sektor ini sering kali bersifat padat modal dan teknologi, tidak selalu linear dengan penyerapan tenaga kerja formal yang berkualitas. Kedua, narasi pertumbuhan ini berjalan paralel dengan tren pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengkhawatirkan, menandakan adanya restrukturisasi ekonomi yang meminggirkan pekerja.

Tahun	Jumlah PHK
2025 (Agustus)	44.333
2024	77.965
2023	64.855
2022	25.114

Sumber: Diolah dari Satudata Kemnaker 2022-2025

Angka PHK ini, yang kemungkinan besar merupakan underestimate karena tidak mencakup sektor informal, menunjukkan bahwa klaim pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis menetes ke bawah (trickle down) menjadi keamanan kerja. Sebaliknya, pekerja yang kehilangan pekerjaan di sektor formal terpaksa beralih ke sektor informal yang minim perlindungan, memperparah siklus kerentanan.

Jurang Kesejahteraan: Upah Pekerja vs. Privilese Elite Politik

Ketimpangan paling telanjang terlihat saat membandingkan kondisi hidup pekerja dengan para pembuat kebijakan. Pada tahun 2025, Upah Minimum Provinsi (UMP) bervariasi dengan tingkat tertinggi DKI Jakarta sebesar 5.396.761 rupiah dan terendah Jawa Tengah sebesar 2.169.348 rupiah. Angka ini sering kali tidak mencukupi untuk biaya hidup layak, terutama di kota-kota besar.

Kondisi ini sangat kontras dengan pendapatan dan kekayaan para pejabat publik. Sebagai contoh, mari kita lihat perbandingan ekstrem dengan kekayaan salah seorang pejabat publik yang juga merupakan anggota DPR RI. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhir, koleksi kendaraan bermotor miliknya saja bernilai Rp38,132 miliar. Seorang pekerja dengan UMP rata-rata 3,1 juta perbulan harus bekerja selama lebih dari seribu tahun—dengan asumsi seluruh gajinya ditabung tanpa digunakan untuk makan, minum, atau kebutuhan lainnya—untuk dapat membeli koleksi kendaraan tersebut.

Perbandingan ini bukan sekadar anekdot, melainkan simbol dari ketimpangan struktural. Kesenjangan juga terlihat dari laju kenaikan pendapatan. Sebelum protes keras di akhir Agustus 2025, pendapatan seorang anggota DPR di atas 100 juta perbulan. Mulai 1 September 2025, setelah tunjangan perumahan sebanyak 50 juta perbulan dihapus, saat ini setiap anggota DPR masih menerima gaji dan tunjangan sebesar 65,5 juta perbulan.

Menurut Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Bernard Allvitro (2025), selain gaji dan tunjangan perbulan, ada "dana aspirasi" (salah satunya reses) anggota DPR yang mencapai lebih dari 4 miliar pertahun dengan rincian sebagai berikut: 1) Kunjungan kerja ke daerah pemilihan pada masa reses (4-5 kali dalam setahun persidangan) Rp2,36 miliar per tahun atau @ Rp472 juta per kegiatan; 2) Kunjungan kerja ke daerah pemilihan pada masa reses atau pada masa sidang (satu kali dalam setahun) Rp 240 juta;

3) Kunjungan kerja ke daerah pemilihan di luar masa reses dan di luar sidang (8 kali dalam setahun) Rp1,5 miliar per tahun. Ini belum termasuk anggaran "rumah inspirasi" yang masing-masing diterima anggota dewan sebesar Rp150 juta. Di awal Oktober 2025, Sufmi Dasco, Ketua DPR, bahkan menyampaikan adanya kenaikan dana reses masing-masing anggota bertambah dari 400 juta menjadi 702 juta rupiah. Dapat dimengerti ketika anggota DPR tampak tidak sedih kehilangan tunjangan 50 juta perbulan untuk perumahan, disebabkan banyaknya tunjangan lain yang justru ditingkatkan.

Bandingkan dengan pendapatan pekerja formal tahun 2025 yang menerima UMP rata-rata nasional sebesar 3,1 juta perbulan atau 37,2 juta pertahun. Lima tahun sebelumnya, pada tahun 2020, UMP rata-rata nasional hanyalah 2,67 juta rupiah. Angka-angka tersebut menunjukkan ketimpangan yang demikian lebar pendapatan elite politik dengan rakyat yang diwakili. Privilese ini menciptakan jarak sosial dan ekonomi yang semakin lebar, serta mengikis rasa keadilan di masyarakat.

Ekspansi Sektor Informal: Arena Pertumbuhan dan Kerentanan

Data BPS per Februari 2025 menunjukkan bahwa penduduk usia kerja di Indonesia mencapai 216,79 juta orang, meningkat 2,79 juta orang dari Februari 2024. Dari penduduk usia kerja tersebut, sebanyak 112,95 juta (84,34 persen) adalah laki-laki dan 103,84 juta (56,70 persen) adalah perempuan. Dari jumlah tersebut, angkatan kerja tercatat sebanyak 153,05 juta orang, bertambah 3,67 juta orang dari tahun sebelumnya. Dari angkatan kerja tersebut, sebanyak 95,28 juta (62,25 persen) laki-laki dan 57,77 juta (37,75 persen) perempuan. Dari jumlah penduduk bekerja tahun 2025 tersebut, sebanyak 86,57 juta (59,40 persen) berada di sektor informal. Sementara jumlah pekerja formal adalah sebanyak 59,19 juta orang (40,60 persen), turun 0,23 persen dibandingkan bulan Februari 2024. Menurut Kepala BPS, Amelia Adininggar Widyasanti, kenaikan pekerja informal salah satunya terkait dengan peningkatan perempuan yang bekerja, utamanya di lapangan usaha perdagangan eceran makanan, industri pengolahan makanan dan penyediaan makanan minuman.

Salah satu subsektor yang mengalami ledakan pertumbuhan adalah pekerja berbasis platform digital, khususnya pengemudi ojek online (ojol). Meskipun jumlah pastinya sulit dilacak, estimasi dari berbagai lembaga riset menempatkan jumlah pengemudi ojol di Indonesia lebih dari 4 juta orang. Mereka adalah wajah dari "ekonomi gig"—fleksibel namun penuh kerentanan.

- **Pendapatan yang Cenderung Menurun:** Studi dari The Prakarsa (2025) menunjukkan rata-rata pendapatan pengemudi ojek online (ojol) turun signifikan selepas pandemi covid-19. Sebelum pandemi atau periode 2018-2019 sekitar Rp309 ribu per hari, dan turun ke Rp175 ribu per hari pada 2022-2023. Padahal sebanyak 26 persen pengemudi ojol telah bekerja lebih dari 48 jam per minggu. Kondisi ini memperlihatkan potret krisis pekerjaan layak di Indonesia, terutama bagi pekerja sektor informal.
- **Kerentanan Multidimensi:** Status "kemitraan" yang disematkan oleh perusahaan aplikasi menempatkan para pengemudi di luar kerangka hukum ketenagakerjaan. Akibatnya, mereka tidak memiliki:
 - **Perlindungan Sosial:** Mayoritas tidak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua). Menurut Diahhadi Setyonaluri (2025), mayoritas pekerja rumah tangga tidak memiliki jaminan sosial dan kontrak kerja. Hanya sekitar 5,4 persen pekerja rumah tangga yang memiliki jaminan sosial. Dan jika merujuk kepada BPS (2021), hanya sekitar 150 ribu pekerja rumah tangga yang memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan (Kompas, 2024).
 - **Keamanan Fisik dan Psikis:** Menurut Juwel Safriko Hutasoit (2025), Sekjen Koalisi Ojol Nasional (KON), selain pengemudi ojol merasa tereksplorasi atas potongan komisi aplikator transportasi daring yang mencapai 20 persen, banyak pengemudi ojol yang mengalami pelecehan seksual saat bekerja mengantarkan penumpang. Korban yang rentan menjadi pelecehan seksual adalah pengemudi perempuan (lady ojol). Bentuk-bentuk pelecehan seksual verbal di antaranya mempertanyakan fisik hingga status sosial mereka di masyarakat. Para pengemudi laki-laki juga ada yang mengalami pelecehan seksual. Tak sedikit dari mereka yang dilecehkan secara fisik dengan sentuhan yang tidak mereka inginkan.

- Hak Berserikat yang Lemah: Upaya untuk membentuk serikat dan melakukan perundingan kolektif seringkali dihadapi dengan sanksi sepihak dari aplikator, seperti penangguhan akun (suspend). Akun adalah satu-satunya jalur pendapatan bagi pekerja ojol. Ketika aplikator melakukan suspend, pekerja ojol kehilangan pekerjaan dan penghasilan saat itu juga, tanpa proses hukum yang jelas atau mediasi. Masalah suspend akun sebagai balasan atas upaya berserikat adalah manifestasi nyata dari kekuasaan absolut aplikator di atas kehidupan ekonomi pekerja ojol, yang secara efektif melumpuhkan hak berserikat dan berunding kolektif mereka.

Rekomendasi Kebijakan: Menuju Pembangunan yang Berkeadilan

Mengatasi paradoks pertumbuhan dan ketimpangan memerlukan pergeseran fundamental dalam paradigma pembangunan. Pemerintah harus bergerak dari fokus mengejar angka pertumbuhan PDB ke arah penciptaan kesejahteraan yang merata. Berikut adalah beberapa langkah kebijakan yang mendesak:

1. Memberikan Pengakuan dan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rentan:

- Sahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT): Mengesahkan RUU ini adalah langkah krusial untuk memberikan pengakuan, standar kerja yang layak, dan perlindungan hukum bagi jutaan PRT dari eksploitasi dan kekerasan.
- Regulasi Perlindungan Pekerja Platform Digital: Pemerintah harus mengeluarkan regulasi yang mendefinisikan ulang status hukum pekerja "mitra" menjadi pekerja, mewajibkan perusahaan aplikasi untuk memberikan upah yang adil, jaminan sosial (BPJS), dan mengakui hak mereka untuk berserikat.

2. Memperkuat Hak-hak Dasar Ketenagakerjaan:

- Cabut UU Cipta Kerja yang merugikan pekerja.
- Pastikan hak pekerja untuk berserikat dan berunding secara kolektif dihormati dan dilindungi tanpa intimidasi.

- Reformulasi mekanisme penetapan upah minimum agar didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang realistis, bukan pada formula yang bias terhadap kepentingan pengusaha.

3. Memperkuat Hak-hak Dasar Ketenagakerjaan:

- Menerapkan sistem pajak yang lebih adil dengan mempertimbangkan pajak kekayaan (wealth tax) atau pajak progresif atas capital gain untuk mendanai belanja sosial yang lebih besar.
- Turunkan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan menerapkan pengecualian pajak untuk kebutuhan pokok seperti sembako.
- Memastikan perusahaan-perusahaan digital multinasional membayar pajak secara adil di Indonesia sesuai dengan skala operasi dan keuntungan mereka.

Hanya dengan langkah-langkah konkret dan berani inilah narasi ekonomi Indonesia dapat berubah—dari cerita tentang pertumbuhan yang dinikmati segelintir orang, menjadi kisah tentang kemakmuran bersama yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2025). *Angkatan kerja (AK) menurut golongan umur* [Dataset]. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/Njk4Izl=/angkatan-kerja--ak--menurut-golongan-umur.html>

Badan Pusat Statistik. (2025, Mei 9). *Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin (ribu jiwa)* [Dataset]. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/WVc0MGEyMXBkVFUXY25KeE9HdDZkbTQzWkVkb1p6MDkjMyMwMDAw/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin--ribu-jiwa-.html?year=2025>

Badan Pusat Statistik. (2025). *Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II-2025 (year-on-year)* [Dataset]. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/>

BBC News Indonesia. (2025, September 5). *Anggota DPR mendapat dana reses Rp2,5 miliar tiap tahun, untuk apa?* BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0j9l4wqz46o>

CNN Indonesia. (2025, September 1). *Riset: Pendapatan ojol anjlok jadi Rp175 ribu usai pandemi*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250901165417-92-1268921/riset-pendapatan-ojol-anjlok-jadi-rp175-ribu-usai-pandemi>

Kamar Dagang dan Industri Indonesia. (2025). *Profil ekonomi Indonesia*. Kadin Indonesia. <https://kadin.id/data-dan-statistik/profil-ekonomi-indonesia/>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025, Agustus). *Ekonomi Indonesia tumbuh 5,12% triwulan II-2025*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Ekonomi-Indonesia-Tumbuh-5,12-Triwulan-II-2025>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025, Agustus). *Ekonomi Indonesia tumbuh 5,12% triwulan II-2025*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Ekonomi-Indonesia-Tumbuh-5,12-Triwulan-II-2025>

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2022). *Jumlah tenaga kerja ter-PHK di Indonesia tahun 2022* [Dataset]. Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan. <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/954>

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2023). Jumlah tenaga kerja ter-PHK di Indonesia tahun 2023[Dataset]. Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan. <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/1659>

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2024). Jumlah tenaga kerja ter-PHK di Indonesia tahun 2024[Dataset]. Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan. <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/2342>

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2025). Jumlah tenaga kerja ter-PHK di Indonesia tahun 2025[Dataset]. Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan. <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/2782>

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2025). *Upah minimum provinsi (UMP) tahun 2025* [Dataset]. Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan. <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/2252>

Kompas, T. H. (2024, September 5). *Pekerja rumah tangga masih minim perlindungan sosial*. Kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/pekerja-rumah-tangga-masih-minim-perlindungan-sosial>

Kompas.com. (2025, Oktober 11). Dana reses anggota DPR naik, ini penjelasan Dasco. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2025/10/11/10583981/dana-reses-anggota-dpr-naik-ini-penjelasan-dasco>

Merdeka.com. (2025, Mei 10). Pekerja informal di Indonesia naik, BPS catat peningkatan 59,40 persen. Merdeka.com. <https://planet.merdeka.com/hot-news/pekerja-informal-di-indonesia-naik-bps-catat-peningkatan-5940-persen-397521-mvk.html>

Setyonaluri, D. (2025, Oktober 7). Menuju perlindungan sosial yang inklusif terhadap kerja perawatan [Slide show].

Tirto.id. (2025, September 3). Koalisi Ojol: Banyak pengemudi alami pelecehan saat bekerja. Tirto.id. <https://tirto.id/koalisi-ojol-banyak-pengemudi-alami-pelecehan-saat-bekerja-hb7o>

TENTANG INFID

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) merupakan organisasi non-pemerintah berbasis anggota sejak tahun 1985. Sebagai forum organisasi masyarakat sipil di Indonesia, INFID mendorong pembangunan berkeadilan yang diwujudkan melalui demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial, perdamaian, serta terjamin dan terpenuhinya Hak Asasi Manusia di tingkat nasional dan global. INFID mewujudkan visi tersebut melalui serangkaian kegiatan yang akuntabel, berbasis bukti, dialogis bersama anggotanya, serta mengedepankan solidaritas dan kesetaraan. INFID memiliki 80 anggota di seluruh Indonesia dan Special Consultative Status untuk UN ECOSOC.

Media Sosial:

-  **Instagram:** infid_id
-  **Twitter:** infid_id
-  **Facebook:** Infid
-  **Linked In:** Infid
-  **YouTube:** INFID TV
-  **Website:** www.infid.org





NGO in Special Consultative Status
with the Economic and Social Council of the United Nations, Ref. No: D1035

.....
Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540
021 7819734, 7819735 | info@infid.org | www.infid.org

Follow Us:



INFID



INFID_ID